PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI SUMATRA SELATAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Diajukan Oleh :

INKAN PUTRI

NPM. 17.01.12.0525

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG
2021

UNIVERSITAS TRIDINANTI

FAKULTAS EKONOMI

PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: INKAN PUTRI
Nomor pokok/NIRM	: 1701120525
Jurusan/Program Studi	: Akuntansi
Jenjang Pendidikan	: Strata 1
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Pemerintahan
Judul Skripsi	:PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANAALOKAS UMUM (DAU), DANA ALOKASIKHUSUS (DAK)DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI SUMATRA SELATAN

Pembimbing Skripsi:

Tanggal 18 oktober 2021 Pembimbing I: Dr.Msy Mikial,SE.M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN: 0205026401

Tanggal 18 oktober 2021 Pembimbing II: Amanda oktariyani,SE.M.Si.Ak.CA
NIDN: 0223128902

113/PS/DFE/21

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Msy Mikial,SE.M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN: 0205026401

Ketua Prodi Akuntansi

Meti Zuliyana,SE.M.Si.Ak.CA
NIDN: 0205056701

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: INKAN PUTRI
Nomor pokok/NIRM	: 1701120525
Jurusan/Program Studi	: Akuntansi
Jenjang Pendidikan	: Strata 1
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Pemerintahan
Judul Skripsi	:PENGARUH PENDAPATANASLIDAERAH (PAD), DANA ALOKAS UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI SUMATRA SELATAN

Pembimbing Skripsi:

Tanggal 18 OKTO 2021 Ketua Penguji: Dr. Msy Mikial,SE.M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN: 0205026401

Tanggal 18 OKTO 2021 Pembimbing I: Amanda oktariyani,SE.M.Si.Ak.CA
NIDN: 0223128902

Tanggal 18 OKTO 2021 Pembimbing II: Febransyah,SE.,M.M
NIDN: 0203026601

113/FS/DFE/21

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Msy Mikial,SE.M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN: 0205026401

Ketua Prodi Akuntansi

Meti Zuliyana,SE.M.Si.Ak.CA
NIDN: 0205056701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ***Menyia-nyiakan Waktu Lebih Buruk Dari Kematian.***

  Karna Kematian Memisahkanmu dari Dunia,

  Sementara Menyia-nyiakan Waktu Memisakanmu dari Allah.

- ***Biar Layar Robek, Biar Kemudi Patah.***

  Lebih Baik Tenggelam, Dari Pada Putar Haluan.

Kupersemahkankepada :

- Allah Swt
- Kedua orang tuaku
- Para pendidikku yang terhormat
- Teman – teman seperjuangan
- Almamater tercinta

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Inkan Putri
Nomor Pokok	: 1701120525
Angkatan	: 2017
Fakultas	: Ekonomi
Program Pendidikan	: Strata 1 (S1)
Skripsi	: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatra Selatan.

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang menjiplak karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, Oktober 2021

Inkan Putri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI SUMATRA SELATAN''.** Skripsi ini merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi program studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang. Saya menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan tetapi saya tetap berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidaklah terlepas dari bantuan, bimbingan pengarahan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr.Ir.Hj.Nyimas Manisah,M.P. Selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Ibu Dr.Msy.Mikial,SE.M.Si.Ak.CA.CSRS. Selaku Dekan dan Pembimbing Utama Saya Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana,SE.M.Si.Ak.CA. Ketua Program Studi Akuntansi.
4. Ibu Amanda Oktariyani,SE.M.Si.Ak.CA. Selaku pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu dan memberi bimbingan serta mengarahkan guna menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
6. Kedua Orang Tua saya Hermansyah dan Lukita Nengsi yang senantiasa memberikan do'a dan semangat.
7. Saudara saya Sundi Suherman, Levi Andrian, Megi Farel Albentino, Abid Rajendra, Lady Diana, Chucen Sundari DLL yang tiada henti memberikan support agar bias menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman perjuangan saya Luxito Andika, Sugiarti, Erlika, Sariatul yang menyemangati saya dan teman-teman seangkatan saya terima kasih.

Sebagai penutup semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada orang-orang yang telah membantu saya dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Palembang , Oktober 2021

Inkan Putri

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xiii
ABSTRAK xiv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kajian Teoritis 9
2.1.1 Keuangan Daerah 9
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 10
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 10
2.1.3.1 Pengertian PAD 10
2.1.3.2 Klasifikasi PAD 11
2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU) 17
2.1.4.1 Pengertian DAU 17
2.1.4.2 Perhitungan DAU 18
2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) 21
2.1.5.1 Pengertian DAK 21
2.1.5.2 Pengalokasian DAK 24

2.1.6 Dana Bagi Hasil (DBH) 28
2.1.6.1 Dana Bagi Hasil Pajak 29
2.1.7 Belanja Modal 30
2.1.7.1 Pengertian Belanja Modal 30
2.1.7.2 Macam- macam Belanja Modal 33
2.1.7.3 Peranan Belanja Modal 35
2.1.7.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal 36
2.2 Penelitian Relevan 37
2.3 Kerangka Berfikir 39
2.4 Hipotesis 40
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 42
3.1.1 Tempat Penelitian 42
3.1.2 Waktu Penelitian 42
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 42
3.2.1 Sumber Data 42
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 43
3.3 Populasi, Sampel, dan Sampling 44
3.3.1 Populasi 44
3.3.2 Sampel dan Sampling 44
3.4 Rancangan Penelitian 46
3.5 Variabel dan Definisi Operasional 47
3.5.1 Variabel Penelitian 47
3.5.2 Definisi Operasional 48
3.6 Teknik Analisis Data 49
3.6.1 Uji Normalitas 49
3.6.2 Uji Asumsi Klasik 49
3.6.3 Analisis Regresi Berganda 52
3.6.4 Analisis Koefisien Determinasi 53
3.6.5 Uji Hipotesis 54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian 56

4.1.1 Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan 56

4.1.2 Gambaran Data Penelitian 58

4.1.2.1 Gambaran Data PAD 58

4.1.2.2 Gambaran Data DAU 60

4.1.2.3 Gambaran Data DAK 62

4.1.2.4 Gambaran Data DBH 65

4.1.2.5 Gambaran Data Belanja Modal 67

4.1.3 Analisis Data 69

4.1.3.1 Uji Normalitas 69

4.1.3.2 Uji Asumsi Klasik 70

4.1.3.2.1 Uji Multikolinearitas 71

4.1.3.2.2 Uji Heteroskedastisitas 72

4.1.3.2.3 Uji Autokorelasi 73

4.1.3.3 Analisis Regresi Berganda 74

4.1.3.4 Uji Hipotesis 77

4.1.3.4.1 Uji F 77

4.1.3.4.2 Uji t 78

4.1.3.5 Analisis Koefisien Determinasi 80

4.2 Pembahasan 81

4.2.1 Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal81

4.2.2 Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal 82

4.2.3 Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal 84

4.2.4 Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal 85

4.2.5 Pengaruh DBH terhadap Belanja Modal 86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 87

5.2 Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan 4
Tabel 2.1 Penelitian Relevan 38
Tabel 3.1 Penentuan Sampel Penelitian 45
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 48
Tabel 4.1 PAD Provinsi Sumatera Selatan 58
Tabel 4.2 DAU Provinsi Sumatera Selatan 60
Tabel 4.3 DAK Provinsi Sumatera Selatan 63
Tabel 4.4 DBH Provinsi Sumatera Selatan 65
Tabel 4.5 Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan 68
Tabel 4.6 Uji Normalitas 70
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas 71
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas 72
Tabel 4.9 Uji Autokorelasi 74
Tabel 4.10 Analisis Regresi Berganda 75
Tabel 4.11 Uji F 77
Tabel 4.12 Uji t 79
Tabel 4.13 Koefisien Determinasi 80

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Skema Perhitungan DAU 21
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 40

ABSTRAK

INKAN PUTRI. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan. (Dibawah bimbingan Ibu Dr. Msy Mikial.SE.M.Si.Ak.CA.CSRS dan Ibu Amanda Oktariyani.SE.M.Si.Ak.CA).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal. Variabel independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Variabel dependen yang digunakan adalah belanja modal.

Populasi dalam penelitian adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 17 kabupaten/kota. Dari 17 kabupaten/kota yang merupakan populasi maka didapat 14 kabupaten/kota yang ditentukan sebagai sampel dengan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sementara hasil koefisien determinasi menunjukkan sebesar 69,4 %. Hasil tersebut menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dan sisanya 30,6 % dijelaskan oleh variabel lain.

RIWAYAT HIDUP

Inkan putri, dilahirkan di Semangus pada tanggal 05 Oktober 1997 dari Ayah Hermansyah dan Ibu Lukita Nengsi, ia anak Kedua dari 5 Bersaudara.

Sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2010 di SD Negeri 03 Semangus, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2013 di SMP Negeri Semangus, dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di Pondok pesantren modern al-ikhlas Lubuk Linggau jurusan IPS pada tahun 2016. Pada tahun 2017 ia masuk Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah memiliki wewenang dalam mengatur daerahnya sendiri karena setiap daerah memiliki hak otonomi tersendiri. Implementasi otonomi daerah ditandai dengan adanya desentralisasi fiskal yang menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri secara otonom.

Setiap daerah memiliki tugas dan wewenang yang pemerintah pusat tidak berhak ikut campur tangan didalamnya karena pemerintah daerah dalam melakukan wewenangnya tidak sembarangan melainkan didasarkan pada dasar hukum dan ketentuan yang berlaku dan dibantu dengan peraturan daerah yang dibuat dan ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari adanya otonomi daerah yaitu untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut serta meningkatkan taraf hidup dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan anggaran daerah yang dimana anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Di Indonesia, bentuk pengelolaan keuangan dalam otonomi daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi, dalam menentukan suatu

anggaran pemerintah memerlukan titik tolak ukur atau pedoman pada tahun sebelumnya.

Pemerintah daerah dalam menentukan anggarannya akan dihadapkan dengan permasalahan pengalokasian anggaran karena pengalokasian anggaran adalah jumlah alokasi dana untuk masing-masing program dimana dana tersebut bersifat terbatas. Artinya pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif.

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 50 menjelaskan bahwa belanja langsung pemerintah daerah terdiri dari tiga (3) komponen yaitu (1) belanja pegawai; (2) belanja barang dan jasa; dan (3) belanja modal. Dari ketiga belanja langsung pemerintah daerah tersebut, belanja modal harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah karena belanja modal dapat diartikan sebagai bentuk belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Suatu belanja dikategorikan belanja modal apabila pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapatalisasi aset atau lainnya yang telah ditetapkan pemerintah, dan perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Sumber-sumber yang mempengaruhi belanja modal adalah besar kecilnya

pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaanya sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan yang berasal dari daerah sebagai modal utama untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah dan merupakan cermin kemandirian bagi suatu daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan perusahaan daerah. Sedangkan dana perimbangan (dana transfer) adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan (dana transfer) terdiri dari dana alokasi :

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

   Menurut Halim (2012:160) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan darah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

   Menurut Kuncoro (2014) Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk daerah khusus terpilih untuk tujuan nasional tertentu.

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200, Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 34 provinsi dimana disetiap provinsi memiliki hak otonomi daerah yang berbeda-beda tetapi tetap berfokus pada pemerintahan pusat dan masyarakat. Salah satu provinsinya yaitu provinsi Sumatera Selatan yang dalam penelitian ini merupakan tempat penelitian yang berupa laporan realisasi anggaran APBDnya. Berikut ini tabel yang menunjukkan perbandingan realisasi per tahun (dari tahun 2017 sampai 2020) antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.1
Realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan
Periode 2017-2020
(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.031.638	2.546.177	3.528.010	1.252.166
Dana Alokasi Umum (DAU)	4.179.277	1.071.421	1.697.762	821.915
Dana Alokasi Khusus (DAK)	439.996	148.180.327	2.171.297	167.300
Dana Bagi Hasil (DBH)	1.320.706	1.025.664	1.320.706	484.669.573
Belanja Modal	1.380.601	607.740.926	1.537.275	35.982.882

Sumber : http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi yaitu bermula pada tahun 2017 sebesar 3.031.638 turun menjadi 2.546.177 ditahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 3.528.010 dan mengalami penurunan lagi ditahun 2020 yaitu menjadi 1.252.166

Nilai Dana Alokasi Umum (DAU) mengalamifluktuasi yaitu bermula pada tahun 2017 sebesar 4.179.277 dana alokasi umum, sedangkan tahun selanjuntnya mengalami penurunan yaitu menjadi 1.071.421 di tahun 2018 dan naik lagi menjadi 1.697.762 di tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020, nilai DAU mengalami penurunan menjadi 821.915

Nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan dari tahun 2017 yaitu sebesar 439.996 dana alokasi khusus di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 148.180.327 di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2.171.297 Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu menjadi 167.300

Nilai Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami fluktuasi yaitu di tahun 2017 menjadi 1.320.706 di tahun 2018 dana bagi hasil mengalami penurunan yaitu sebesar 1.025.664. Pada tahun 2019, nilai DBH mengalami kenaikan yaitu sebesar 1.320.706 dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang ditransfer ke pemerintah. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 484.669.573.

Nilai Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2017 sebesar 1.380.601 dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 607.740 Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi

1.537.275 Akan tetapi, di tahun 2020 mengalami penurunan lagi menjadi 35.982.882

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis khususnya di bidang ilmu akuntansi pemerintah serta dapat menerapkan sebagian ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dunia luar.

2. Bagi Instansi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan dan memutuskan kebijakan untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil instansi agar dapat digunakan sebagai titik tolak ukur dalam menentukan Belanja Modal.

3. Bagi Akademis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan serta menjadi bahan referensi atau masukan dalam penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti lainnya yang terkhusus dibidang akuntansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, N.N., 2010,*Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Keuangan Pemerintah Daerah.* Kencana : Jakarta.

Alhamda. S., 2016,*Buku Ajar Metlit dan Statistik.* CV Budi Utama.

Astuti, Dwi, Novita, 2017, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014*. Skripsi.

Darise, N. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: Indeks.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan APBD, www.djpk.depkeu.go.id.

Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Edisi Pertama Cetakan Kelima* : Palembang.

Ginting, Ketrin Aprila, 2016, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kota di Pulau Sumatera Dengan Belanja Modal Sebagai Pemoderasi (periode 2011-2013).*Skripsi.

Ghozali, Imam, 2018,*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Halim, Abdul, 2012, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edward Tanujaya : Yogyakarta.

Hoesada, J, 2016, *Akuntansi Pemerintahan (Bunga Rampai),* Salemba Empat : Jakarta.

Karyadi, 2017, *Pengaruh Pendapatan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*. Skripsi.

Kawerdar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani, 2015, *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit UNDIP : Semarang.

Kuncoro, Mudrajad, 2014, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Ketujuh*. Penerbit Erlangga : Yogyakarta.

Mardiasmo, 2014, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi : Yogyakarta.

Noor, Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Edisi Pertama*, Prenadamedia Group : Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Priyatno, Duwi, 2017, *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*, ANDI (Anggota IKAPI) : Yogyakarta.

Republik Indonesia, 2004, *UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia, 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.*

Republik Indonesia, 2000, *UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia, 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia, 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Republik Indonesia, 2014, *UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.

Sumarsono, Sonny, 2010, *Manajemen Keuangan Pemerintah*, Graha Ilmu : Jakarta.

Sunyoto, Danang, 2016,*Metodologi Penelitian Akuntansi*, PT Refika Aditama: Bandung.

Ulum MD, I, 2012, *Audit Sektor Publik Edisi Pertama Cetakan Kedua*. Bumi Aksara : Jakarta.

Yana, Widya, 2018, *Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan DOK terhadap Belanja Modal dengan SILPA sebagai Variabel Pemoderasi pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh*. Skripsi.

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ diakses pada tanggal 22 April 2021.

https://www.sumselprov.go.id diakses pada tanggal 22 April 2021.

https://www.sumsel.bps.go.id diakses pada tanggal 23 April 2021.

https://eprints.umpo.ac.id diakses pada tanggal 02 Juni 2021.

https://www.sumselprov.go.id/diakses pada 12 Juli 2021.